

Perkembangan Sistem Pendidikan di Brunei Darussalam

Sulthoni Alfathon ^{1*}, Mislaini Mislaini ², Khairul Fajri ³, Alkautsar Taufiq ⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email : sulthonialfathonpaib@gmail.com ^{1*}, mislaini101083@gmail.com ², khairulaji27@gmail.com ³, alkautsartaufiq886@gmail.com ⁴

Abstract, *The education system in Brunei Darussalam has a clear structure and supports sustainable human resource development. Education in Brunei includes preschool, primary, secondary and higher education levels which are managed by the Ministry of Education. This system provides free education for citizens and aims to improve the quality of the young generation so they can compete globally. The curriculum in Brunei has developed along with the demands of the times, emphasizing a balance between academics, life skills and character development. Educational programs also include technical and vocational education to prepare students to enter the world of work. Educational policies are designed to improve teaching quality, innovation, and technology integration. However, the education system in Brunei still faces a number of challenges such as modernizing infrastructure, increasing teacher competency, and adapting to global changes. The government continues to carry out reforms to address these challenges, with the hope of creating a superior and sustainable education system.*

Keywords: *Education system, curriculum, education policy, Brunei Darussalam.*

Abstrak: Sistem pendidikan di Brunei Darussalam memiliki struktur yang jelas dan mendukung pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Pendidikan di Brunei mencakup jenjang prasekolah, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Sistem ini menyediakan pendidikan gratis bagi warga negara dan bertujuan meningkatkan kualitas generasi muda agar mampu bersaing secara global. Kurikulum di Brunei mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan zaman, menekankan keseimbangan antara akademik, keterampilan hidup, dan pengembangan karakter. Program pendidikan juga mencakup pendidikan teknis dan kejuruan untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja. Kebijakan pendidikan dirancang untuk meningkatkan kualitas pengajaran, inovasi, dan integrasi teknologi. Namun, sistem pendidikan di Brunei masih menghadapi sejumlah tantangan seperti modernisasi infrastruktur, peningkatan kompetensi guru, dan adaptasi terhadap perubahan global. Pemerintah terus melakukan reformasi untuk menjawab tantangan ini, dengan harapan menciptakan sistem pendidikan yang unggul dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sistem Pendidikan, Kurikulum, Kebijakan Pendidikan, Brunei Darussalam

1. PENDAHULUAN

Brunei Darussalam adalah negara kecil yang terletak di Asia Tenggara dengan luas wilayah sekitar 5.765 km² dan populasi sekitar 450.000 jiwa. Sebagai negara dengan perekonomian yang kuat berkat kekayaan minyak dan gas, Brunei memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia melalui sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Pendidikan di Brunei dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan diberikan secara gratis bagi warga negara, mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan.

Sistem pendidikan Brunei memiliki struktur yang mencakup jenjang prasekolah, pendidikan dasar, menengah, pendidikan teknis dan kejuruan, serta pendidikan tinggi. Reformasi pendidikan dilakukan untuk memastikan kurikulum tetap relevan dengan tuntutan

perkembangan global. Kurikulum Brunei menekankan penguasaan akademik, keterampilan berpikir kritis, dan pengembangan karakter siswa. Selain itu, pendidikan teknis dan kejuruan melalui *Institute of Brunei Technical Education* (IBTE) bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Meskipun memiliki kebijakan pendidikan yang baik, Brunei masih menghadapi tantangan seperti modernisasi infrastruktur pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pengajar, serta adaptasi terhadap teknologi dan metode pembelajaran terbaru. Upaya terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan investasi dalam teknologi pendidikan. Melalui strategi ini, Brunei berusaha memastikan bahwa sistem pendidikannya dapat mencetak generasi yang mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional dan bersaing di tingkat global.

Dengan landasan pendidikan yang kuat, diharapkan Brunei Darussalam mampu menjawab tantangan global dan terus memajukan kesejahteraan masyarakatnya sesuai dengan visi negara untuk menjadi bangsa yang berpengetahuan dan berdaya saing tinggi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan. Menurut Nazir (2003), studi kepustakaan dilakukan dengan memeriksa buku, literatur, catatan, dan laporan terkait untuk memahami dan memecahkan masalah penelitian.

Danial dan Warsiah (2009) juga menjelaskan bahwa studi kepustakaan adalah metode yang melibatkan pengumpulan informasi dari buku, majalah, dan dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian. Proses Studi Kepustakaan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi Sumber: Mengumpulkan buku, jurnal, dan artikel terkait sistem pendidikan di Inggris.
2. Pengumpulan Data: Membaca dan mencatat poin-poin penting dari sumber literatur.
3. Analisis: Menghubungkan data yang diperoleh dengan teori dan konteks yang relevan.
4. Sintesis: Menyusun argumen yang terstruktur untuk menjawab fokus penelitian.

Metode ini memberikan landasan teoretis yang kuat, akses data yang luas, serta lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Namun, keterbatasannya adalah bergantung pada validitas data sekunder dan tidak menyediakan bukti empiris langsung.

Dengan demikian, metode studi kepustakaan memungkinkan peneliti menyajikan analisis mendalam tentang perkembangan sistem pendidikan di Inggris secara efektif.

3. PEMBAHASAN

Profil Negara Brunei Darussalam

1. Kondisi Geografis

Disebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah timur, selatan, dan barat berbatasan dengan Negara bagian Serawak, Malaysia. Berdasarkan letak astronominya, Brunei Darussalam terletak pada 4° LU-5° LU dan 114° BT-115 BT. Luas wilayah Brunei Darussalam 5.765 km.

2. Sosial Budaya Brunei Darussalam

Kira-kira dua pertiga jumlah penduduk Brunei adalah orang Melayu (66,3%). Kelompok etnik minoritas yang paling penting dan yang menguasai ekonomi Negara ialah orang Tionghoa (Han) yang menyusun lebih kurang 11.2% jumlah penduduknya. Disusul penduduk asli dayak (3.4%) dan suku-suku lainnya (19,1%). Etnis-etnis ini juga menggambarkan bahasa-bahasa yang paling penting: bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi, serta bahasa Tionghoa. Bahasa Inggris juga dituturkan secara meluas, dan terdapat sebuah komunitas ekspatriat yang agak besar dengan sejumlah besar warganegara Britania dan Australia. Islam ialah agama resmi Brunei (67%), dan Sultan Brunei merupakan kepala Negara itu. Agama-agama lain yang dianut termasuk agama budha (13%), agama Kristen (10%), Serta agama-agama orang asli (dalam komunitas-komunitas yang amat kecil [10%]).

3. Kondisi Ekonomi

Ekonomi kecil yang kaya ini adalah suatu campuran kewirausahaan dalam negeri dan asing, pengawalan kerajaan, kebajikan, serta tradisi kampung. Pengeluaran minyak mentah dan gas alam terdiri dari hampir setengah PDB. Pendapatan yang cukup besar pekerjaan luar negeri menambah pendapatan daripada pengeluaran dalam negeri. Kerajaan membekali semua layanan pengobatan dan memberikan subsidi beras dan perumahan. Pemimpin- pemimpin Brunei merasa bimbang bahwa keterpaduan dengan ekonomi dunia yang semakin bertambah akan mempengaruhi perpaduan sosial dalam, walaupun Brunei telah memainkan peranan yang lebih kentara dengan menjadi ketua forum APEC pada tahun 2000.

Rancangan- rancangan yang dinyatakan untuk masa hadapan termasuk peningkatan keterampilan tenaga buruh, pengurangan pengangguran, pengukuhan sektor-sektor perbankan dan pariwisata, serta secara umum, peluasan lagi asas ekonominya. Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia satuan mata uangnya adalah Brunei Dollar yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura. Selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi melalui upaya peningkatan di bidang perdagangan dan industri.

4. Sistem pemerintah Brunei Darussalam

Kerajaan Brunei Darussalam adalah Negara yang memiliki corak pemerintah monarki absolut berdasarkan hukum Islam dengan Sultan yang menjabat sebagai kepala Negara dan kepala pemerintah, merangkap sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa menteri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala Negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet. menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri.

Sistem Pendidikan di Brunei Darussalam

Brunei Darussalam merupakan salah satu Negara di Asia Tenggara yang sangat makmur. Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang sultan yang sekaligus sebagai Kepala Pemerintah. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Brunei Darussalam lebih mengutamakan pada penciptaan SDM yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi. Pendidikan formal di Brunei dimulai tahun 1912 dengan mulai dibukanya Sekolah Melayu di Bandar Brunei (Bandar Seri Begawan sekarang). Kemudian diikuti dengan pembukaan sekolah- sekolah lainnya di wilayah Brunei Muara, Kuala Belait dan Tutong. Sebelumnya pada 1916, masyarakat Tionghoa telah mendirikan sekolah sendiri di Bandar Seri Begawan.

Pada tahun 1966, sekolah Melayu pada tingkat pendidikan menengah dibuka di Belait. Tahun 1979 pendidikan TK yang merupakan bagian tingkat dasar mulai diterapkan di Brunei. Sedangkan university Brunei Darussalam didirikan pada tahun 1985 sebagai lembaga tertinggi dibidang pendidikan. Sejak tahun 1984 kurikulum pendidikan nasional mewajibkan para siswa untuk menguasai dwi bahasa yaitu bahasa Melayu dan Inggris. Bahasa Melayu digunakan

untuk mengajar mata pelajaran bahasa Melayu, pengetahuan Agama Islam, pendidikan jasmani, lukisan dan pertukangan tangan. Sedangkan bahasa Inggris digunakan untuk mengajar mata pelajaran seperti sains, matematika, geografi, sejarah, dan bahasa Inggris itu sendiri.

Dengan demikian, pemerintah Brunei Darussalam merumuskan model pendidikan yang objektif yaitu pendidikan sebagai wadah untuk melahirkan rakyat yang taat beragama dimana mereka akan menjadi pelita umat yang mempunyai pemahaman dan pegangan yang benar. Kearah itulah, maka pemerintah Brunei Darussalam turut berharap supaya manusia yang dirancang dan akan lahir yaitu menjadi manusia Brunei yang berilmu, mahir, dan beramal salih.

Sejak tahun 2008. Brunei telah mulai melakukan transisi kepada sistem pendidikan baru yang disebut sebagai SPN21, akronim dari sistem Pendidikan Negara abad ke- 21. SPN21 adalah sistem pendidikan dirancang untuk memberikan kesempatan dan kelulusan bagi para siswa untuk mencapai status pendidikan yang tinggi sesuai dengan kemampuan akademik mereka masing-masing, sebagaimana misi meo (kementerian pendidikan) adalah untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh untuk mencapai potensi yang penuh bagi semua.

Sistem ini mulai diterapkan pada siswa tahun 7 (menengah pertama) tahun ajaran 2008. yaitu para lulusan ujian PSR 2007 (semacam unas sd). Kemudian pada tahun 2009 dilakukan transisi bagi siswa tahun 1 dan tahun 4 kepada sistem ini dan akan diterapkan sepenuhnya pada tingkat dasar pada tahun 2011.

1. Pra- pendidikan

Anak berusia 5 tahun disarankan untuk memasuki pra-pendidikan dasar, Bahkan pada lembaga pendidikan pra-sekolah swasta bisa dibawah 3 tahun. Kurikulum pada tingkat ini meliputi kelas-kelas bahasa dasar serta aritmatika, kewarganegaraan, dasar pelajaran agama Islam, pendidikan jasmani, dan pengembangan bakat yang semuanya diajarkan dengan menggunakan unsur-unsur sekitarnya. Pelajaran diadakan secara informal. Tidak ada periode waktu alokasi khusus per pelajaran karena pengajaran terintegrasi dan disalurkan melalui aktivitas anak-anak.

2. Pendidikan dasar

Pendidikan dasar berdasarkan SPN21 dibagi menjadi 2 tingkat: tingkat bawah (tahun 1) dan tingkat atas (hingga tahun 6). Semua siswa menjalani kurikulum yang sama pada tahun 1 hingga tahun 3. Bagi siswa yang ingin memasuki sekolah Arab maka harus melewati ujian masuk sekolah Arab pada tahun 4. Saat mengakhiri masa

pendidikan dasar, semua siswa termasuk yang mengikuti sekolah Arab, menjalani ujian penilaian sekolah rendah (PSR) sebelum memasuki sekolah menengah.

3. Pendidikan Menengah

Didalam SPN21, pendidikan menengah adalah pendidikan 4 atau 5 tahun. Semua siswa mengikuti kurikulum yang sama pada tahun 7 hingga tahun 8. Pada akhir tahun 8, para siswa mengikuti ujian penilaian menengah bahwa yang diujikan pada tahun ke 3 menengah bahwa berdasarkan hasil pengujian kemajuan pelajar, siswa akan diarahkan ke program pendidikan menengah umum 4 atau 5 tahun. Selain itu juga terdapat program pendidikan khusus yang diperuntukkan bagi siswa berkecerdasan tinggi dalam bidang olahraga, musik, seni pertunjukan, dan seni rupa.

Disamping juga menyediakan program pendidikan berkeperluang khusus yang ditunjukan untuk siswa yang kurang penglihatan dan pendengaran, atau cacat mental, cacat fisik, atau mempunyai kesulitan pembelajaran yang khusus. Siswa diberikan kesempatan untuk beralih program semisal dari program pendidikan 4 tahun ke program pendidikan menengah atau sebaliknya, namun tetap dengan pertimbangan hasil pencapaian pembelajaran dan syarat-syarat yang ditentukan. Siswa yang hendak mengakhiri masa pendidikannya akan mengikuti ujian BCGCE peringkat O diakhiri tahun 10 bagi yang mengikuti program pendidikan menengah 4 tahun, atau diakhir tahun 11 untuk siswa program pendidikan menengah 5 tahun.

4. Pasca Pendidikan Menengah

- a. *Technical Collage*
- b. Sekolah Kejuruan

5. Pendidikan tinggi

a. *Technical and Engineering Colleges*

Sultan Saiful Rijal *Technical College* dan Jefri *Bolkiah College of Engineering* adalah institusi pasca sekolah menengah yang membekali lulusan sekolah menengah dan pekerja dewasa dengan ketrampilan teknis dan pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari berbagai sektor industri.

b. Perguruan Tinggi Keperawatan Pengiran Anak Putri Rashidah

Sebagai perawat tersier dan kebidanan lembaga pendidikan, perguruan tinggi menawarkan pra-registrasi Diploma Keperawatan dan Kebidanan yang mencakup konversi program dan diploma tingkat lanjut dalam keperawatan sebagai perawat yang terdaftar.

c. Institut Teknologi Brunei (ITB)

Lembaga ini didirikan untuk memastikan pelatihan berbasis luas untuk pemuda cenderung berorientasi terhadap praktik studi di tingkat *Higher National Diploma*. ITB juga melayani pelatihan dan kursus-kursus yang menawarkan program bisnis dan keuangan, komputing dan sistem informasi, komunikasi dan sistem komputer, dan tenaga listrikan dan jasa teknik bangunan.

d. University Brunei Darussalam (UBD)

UBD menjadi satu-satunya universitas di kesultanan. Dari awal yang sederhana kini menjadi berkembang menawarkan disiplin ilmu seperti ilmu pengetahuan, bisnis, studi ekonomi dan kejakannya, teknik, kedokteran, dan ilmu sosial. *Sultan Hasan al Bolkiah. Institute of Education (SHBIE)* adalah sebuah fakultas di UBD yang menawarkan pelatihan guru muda dan berbagai program pelatihan guru.

Sistem Kurikulum di Brunei Darussalam

Model kurikulum persekolahan di Brunei Darussalam merupakan model yang berorientasi pada mata pelajaran (*subject coment*). Jumlah mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari pra-sekolah sampai dengan sekolah menengah berkisar antara 7 sampai 9 mata pelajaran.

Sedangkan mata pelajaran di pre-universitas sebanyak 12 mata pelajaran. Pada akhir-akhir ini, pengembangan kurikulum sekolah kejuruan telah dikembangkan materi pembelajaran yang mengacu pada standart kompetensi (*competency based*) suatu pekerjaan yang relevan dengan tuntutan dunia usaha industri. Hasil pengembangan dimaksudkan saat ini sedang diimplementasikan di sekolah kejuruan yang pemantauannya dilakukan bersama- sama oleh sekolah dengan dunia usaha/industri.

Suatu hal menarik adalah bahwa bahasa. Inggris telah diajarkan semenjak TK sampai dengan sekolah rendah bawah (*lower primery*) kelas 1 sampai dengan 3. Sedangkan penggunaan dwibahasa (*bilingual language*) dimulai sejak sekolah rendah atas (kelas 4 sampai dengan 6 sampai dengan sekolah menengah atas (*upper secondary*)). Namun demikian, beberapa mata pelajaran harus disampaikan dengan menggunakan Bahasa Melayu seperti pendidikan agama Islam, seni dan kemjinan serta Malay Islam Berjaya (MIB). Sebaliknya pengajaran matematika, sejarah, sains, geografi, disampaikan dengan Bahasa Inggris.

Model-model proses perkembangan kurikulum

Perkembangan atau pembinaan kurikulum merujuk kepada proses untuk membuat keputusan tentang program kurikulum dan mengkaji semula hasil keputusan itu dalam

penilaian yang berterusan. Perkembangan kurikulum melibatkan kegiatan mereka dalam komponeninstruksi, rancangan instruksi yang khusus serta bahan-bahan sokongan instruksi dan pengajaran. Secara umumnya perkembangan kurikulum mempunyai 4 fasa atau peringkat matlamat dan objektif, perancangan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan penilaian kurikulum. 5 model perkembangan kurikulum adalah model atau contoh cara proses Pembina kurikulum. Semua model ini menunjukkan fasa dan urutan untuk melaksanakan tiap-tiap fasa dalam proses pembinaan kurikulum. Berikut adalah 5 model perkembangan kurikulum yang mempreskripsi proses ini.

1. Model Taba (1962)

Menggunakan kaidah "gmss-root" untuk membina kurikulum. Secara ringkasnya, taba mengenalkan cara membina kurikulum adalah dengan bermula spesifik kepada reka bentuk kurikulum yang lebih umum. Faedah yang beliau perkenalkan ini hamper sama dengan tayler.

2. Model Saylor. Alexander dan Lewis (1981)

Mengkonsepsikan proses perancangan kurikulum dengan mencari matlamat dan objektif kurikulum. kemudian diikuti dengan mereka bentuk kurikulum mengikut bentuk matlamat, objektif dan domain kurikulum. Selepas itu proses pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan oleh tenaga pengajar atau guru-guru yang terlibat. Dan akhir sekali adalah penilaian kurikulum untuk menentukan kurikulum yang dijalankan itu berkesan atau tidak.

3. Model Tayler atau Rasional Tyler

Adalah model perkembangan kurikulum yang terkenal yang memberikan tumpuan kepada fasa perancangan. Model ini didapati dalam buku beliau bertajuk *Basic principles of curriculum and instruction* (1949). Ia menjelaskan proses pemilihan objektif pendidikan, suatu proses yang diketahui umum dan diamalkan oleh pembina kurikulum.

4. Model Olivia (1976)

Pembina kurikulum boleh menggariskan kriteria atau ciri-ciri untukmembina dan memperbaiki kurikulum sebelum memilih atau membina sesuatu model baru.Model yang dikenalkan Olivia lebih bersifat sistematik dan komprehensif. Ia mudah dan boleh diubah mengikut kesesuaian.

5. Model Hunkins (1980)

Mempunyai 7 fasa:

- a. Mengkonsepsi kurikulum dan mendapatkan kesahan
- b. Diagnose kurikulum, menterjemah keperluan kepada punca dan matlamat
- c. Pemilihan kandungan
- d. Pemilihan pengalaman
- e. Pelaksanaan
- f. Penilaian
- g. Pengekalan.

Pendapatan guru di Negara Brunei Darussalam

Sistem pendidikan di Brunei Darussalam memiliki standar yang cukup baik dalam memberikan kompensasi kepada tenaga pendidik. Gaji guru di negara ini bervariasi tergantung tingkat pendidikan, kualifikasi, dan lama pengalaman kerja.

Rata-rata pendapatan guru di sektor publik di Brunei berkisar antara BND 2,000 hingga BND 3,500 per bulan tergantung pangkat dan pengalaman mengajar. Sebagai perbandingan, guru dengan pangkat lebih tinggi, seperti kepala sekolah atau pengawas pendidikan, memiliki gaji yang lebih besar, dapat mencapai BND 4,000 hingga BND 5,000 per bulan. Selain gaji pokok, guru di Brunei juga menerima berbagai tunjangan, seperti tunjangan keluarga, perumahan, dan transportasi.

Untuk guru di sekolah swasta, pendapatan biasanya sedikit lebih rendah dibandingkan sektor publik, tetapi beberapa institusi swasta menawarkan gaji kompetitif guna menarik tenaga pendidik berkualitas. Sistem ini juga didukung dengan kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan profesional guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Kebijakan Pendidikan Di Brunei Darussalam

Pendidikan Islam dipahami sebagai upaya komprehensif untuk membentuk siswa menjadi umat Islam yang berkembang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Seiring dengan perkembangan ini, mulai muncul lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan sekolah Islam terpadu sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat di Asia Tenggara, dengan masing-masing negara membentuk pola pendidikan Islam sesuai konteksnya.

Di Brunei Darussalam, sistem pendidikan di Balai dilaksanakan dua kali lipat, yaitu untuk pengajaran umum dan khusus. Balai sendiri merupakan fasilitas khusus tempat belajar bagi anak-anak. Pengajaran umum terbuka untuk masyarakat tanpa batasan sosial atau usia tertentu,

sementara pengajaran khusus diikuti oleh kelompok tertentu seperti pegawai agama, ulama, kadhi, juru nikah, dan lainnya. Namun, sistem pendidikan di Balai ini terbatas hanya untuk kalangan laki-laki, sementara perempuan mendapatkan pendidikan di rumah masing-masing.

Meskipun demikian, sistem pendidikan informal di Masjid, Balai, dan tempat lain tetap berlanjut di Brunei Darussalam. Namun, dengan pesatnya perkembangan lembaga pendidikan seperti masjid, rumah, dan balai, sistem pendidikan Islam di negara tersebut telah beralih ke sistem formal yang dijalankan melalui sekolah dan diatur oleh pemerintah, khususnya oleh pihak Kerajaan Brunei.

Meskipun sistem formal pendidikan telah diterapkan secara resmi, namun sistem non-formal yang diselenggarakan di masjid, balai, dan tempat lainnya tetap berlangsung. Lembaga pendidikan Islam formal di Brunei mencakup berbagai jenis, seperti sekolah Arab, sekolah agama, tahfizul Quran, Institut Tahfiz Alquran Sultan Hassanul Bolkihah, Institut Pengajian Islam yang dikelola oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, serta Fakultas Islamic Studies dan Universitas Brunei Darussalam.

Lembaga-lembaga ini terus berkembang baik dari segi infrastruktur, kelembagaan, maupun sumber daya manusia, dengan dukungan dan campur tangan besar dari Pemerintah Kerajaan Brunei. Pemerintah Brunei Darussalam sangat memperhatikan pendidikan agama, bahkan menjadi fokus perhatian yang lebih dari Sultan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di negara tersebut.

Pendidikan di Brunei Darussalam memiliki posisi yang sangat penting dalam pembangunan negara, dan pemerintah Brunei telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan sistem pendidikan negara tersebut. Berikut adalah beberapa kebijakan pendidikan yang telah diimplementasikan di Brunei Darussalam :

1. Pendidikan Gratis

Pemerintah Brunei menyediakan pendidikan dasar dan menengah secara gratis bagi semua warga negara Brunei. Ini termasuk sekolah dasar, menengah, dan atas.

2. Kurikulum Nasional

Brunei memiliki kurikulum nasional yang dikembangkan untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan negara. Kurikulum ini mencakup berbagai mata pelajaran termasuk bahasa, sains, matematika, dan studi Islam.

3. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di semua tingkatan pendidikan. Ini termasuk pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan peningkatan infrastruktur pendidikan.

4. Pendidikan Teknologi dan Informatika

Pemerintah Brunei telah mengakui pentingnya pendidikan dalam bidang teknologi dan informatika. Inisiatif telah diluncurkan untuk memperkenalkan dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran di sekolah-sekolah.

5. Pendidikan Agama

Pendidikan agama, terutama Islam, memiliki peran penting dalam sistem pendidikan Brunei Darussalam. Materi keagamaan diajarkan di sekolah-sekolah untuk memastikan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama.

6. Pendidikan Tinggi

Brunei memiliki Universitas Brunei Darussalam (UBD) dan Institut Teknologi Brunei (ITB) sebagai lembaga-lembaga pendidikan tinggi utama. Pemerintah terus memperkuat pendidikan tinggi untuk mempersiapkan lulusan yang siap bersaing secara global.

7. Pendidikan Kejuruan

Pemerintah juga telah fokus pada pengembangan pendidikan kejuruan untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam pasar kerja, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

8. Pendidikan Kepemudaan dan Pengembangan Karakter

Selain akademik, pemerintah juga menekankan pentingnya pengembangan karakter dan kepemudaan. Berbagai program ekstrakurikuler dan kegiatan di luar kelas diselenggarakan untuk mengembangkan kepemimpinan, keterampilan sosial, dan nilai-nilai positif pada siswa.

Kebijakan-kebijakan ini merupakan upaya pemerintah Brunei Darussalam untuk memastikan bahwa pendidikan di negara tersebut berkualitas tinggi dan relevan dengan tuntutan zaman, serta untuk menciptakan generasi muda yang terdidik dan siap menghadapi masa depan.

Problematika Pendidikan Di Brunei Darussalam

Beberapa problematika yang dihadapi dalam sistem pendidikan di Brunei Darussalam meliputi:

1. Kesenjangan Pendidikan

Meskipun Brunei memiliki sistem pendidikan yang berkembang, masih ada kesenjangan akses dan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok etnis atau ekonomi yang berbeda.

2. Kurangnya Tenaga Pengajar Berkualitas

Brunei mungkin menghadapi tantangan dalam menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas, terutama di bidang-bidang yang spesifik dan tingkat pendidikan menengah dan tinggi.

3. Relevansi Kurikulum

Dalam menghadapi perubahan global dan kemajuan teknologi, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan di Brunei tetap relevan dan mempersiapkan siswa untuk tuntutan dunia kerja yang terus berubah.

4. Pengintegrasian Teknologi dalam Pendidikan

Meskipun ada upaya untuk memperkenalkan teknologi dalam pembelajaran, masih ada tantangan dalam mengintegrasikan teknologi secara efektif ke dalam kurikulum dan praktik pengajaran.

5. Pendidikan Inklusif

Meningkatkan akses dan pendidikan yang inklusif bagi siswa dengan kebutuhan khusus adalah sebuah tantangan. Ini mencakup pembangunan fasilitas, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum yang sesuai.

6. Pembangunan Profesionalisme Guru

Penting untuk terus meningkatkan profesionalisme guru melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, sehingga mereka dapat memberikan pengajaran yang berkualitas dan mendukung perkembangan holistik siswa.

7. Peningkatan Partisipasi dan Retensi Siswa

Penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi dan retensi siswa di sekolah, termasuk masalah seperti kurangnya motivasi, dukungan sosial, atau tantangan akademik.

8. Pembiayaan Pendidikan

Memastikan pembiayaan yang memadai untuk pendidikan adalah faktor kunci dalam memperbaiki sistem pendidikan. Hal ini mencakup alokasi dana yang cukup untuk infrastruktur, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum.

Perbandingan Pendidikan di Brunei Darussalam dan di Indonesia

Sistem Pendidikan di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada sistem Pendidikan menengah pertama, sedangkan perbedaannya yaitu pada sistem pendidikan menengah atas dan pada penggunaan bahasa Inggris dalam proses belajar mengajar. Perbandingan pendidikan di Negara Indonesia dengan Brunei Darussalam dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Aspek	Brunei Darussalam	Indonesia
1.	Tujuan Pendidikan	Pendidikan diarahkan pada tiga bidang utama yaitu: a) Sistem dwibahasa di semua sekolah, b) Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) dalam kurikulum sekolah, c) Peningkatan serta perkembangan sumber daya manusia.	Sistem Pendidikan Nasional yang mempunyai arti keseluruhan komponen Pendidikan yang saling terkait serta terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
2.	Sistem Pendidikan	Sistem menggunakan pola A 7-3-2-2 yang melambangkan lama masa studi masing-masing tingkatan pendidikan. 7 tahun untuk tingkat dasar, 3 tahun untuk tingkat menengah pertama, 2 tahun untuk tingkat menengah atas serta. 2 tahun untuk pra universitas.	Sistem Pendidikan diatur melalui UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia, terbagi dalam 3 jalur utama yaitu Pendidikan formal, non formal dan informal. Pendidikan juga dibagi kedalam 4 jenjang yaitu jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

3.	Kurikulum	Kurikulum menggunakan konsep Melayu Islam Beraja (MIB) dengan tujuan utama membentuk dan menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak, beragama dan menguasai teknologi.	Sesuai dengan Undang- Undang yang ditetapkan pada Pendidikan di Indonesia pada. saat ini. Kurikulum disusun dan dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan manusia yang memiliki kekuatan spiritual pengendalian keagamaan, diri, kepribadian, kecerdasan. akhlak mulia. serta. keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
4.	Ujian Kenaikan kelas dan Tingkat	Kenaikan tingkat dari TK ke SD dilakukan otomatis. Tingkat secara selanjutnya ujian akhir tahun dan hanya murid yang berprestasi saja yang dapat melanjutkan ke kelas berikutnya.	Ujian kenaikan kelas dilaksanakan berdasarkan <i>grade</i> dan sertifikasi dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
5.	Pendanaan	Pemerintah mengalokasikan dana secara penuh bagi Pendidikan dengan menanggung semua biaya termasuk penginapan, makanan, buku dan	Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN.

		transportasi. Semua pembiayaan pembelajaran (siswa/mahasiswa dan guru/dosen) sudah menjadi tanggung jawab pemerintah (kerajaan).	
6.	Pendidikan	Profesionalitas guru menjadi perhatian pemerintah dengan gaji besar dan fasilitas yang menjanjikan. Guru tidak berbisnis dan tidak mau berpolitik praktis, karena politik diserahkan kepada kerajaan. Tugas guru hanyalah mendidik.	Profesionalitas guru juga menjadi perhatian pemerintah tetapi belum mampu menggaji besar meskipun sudah diberi tunjangan sertifikasi sebesar dua kali lipat gaji, namun belum diberi fasilitas yang baik dan memadai. kesejahteraan guru masih menjadi permasalahan.

4. KESIMPULAN

Sistem pendidikan di Brunei Darussalam memiliki struktur yang komprehensif dan mendukung pembangunan nasional melalui pendidikan gratis dan berkualitas bagi warga negaranya. Dengan jenjang pendidikan mulai dari prasekolah, dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi, Brunei memastikan akses yang merata dan pengembangan keterampilan akademik serta karakter siswa. Kurikulum yang dinamis terus dikembangkan untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman, termasuk pendidikan teknis dan kejuruan yang mempersiapkan tenaga kerja terampil.

Namun, Brunei masih menghadapi tantangan seperti peningkatan kompetensi guru, modernisasi infrastruktur, dan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Kebijakan pendidikan yang adaptif dan reformasi berkelanjutan menjadi kunci untuk menjawab permasalahan ini. Dengan strategi yang tepat, Brunei Darussalam berpotensi menghasilkan

sumber daya manusia yang kompetitif, berdaya saing global, dan mampu mendukung visi pembangunan berkelanjutan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, H. (2023). *Transformasi Pendidikan di Brunei Darussalam: Kebijakan dan Praktik Kontemporer*. Bandar Seri Begawan: Penerbit Universiti Brunei Darussalam.
- Abduh, Hasbi. 2021. Perbandingan Pendidikan Di Negara Brunei Darussalam Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia) Hikmah. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Abdul Ghafur, "Islam dan Politik di Brunei Darussalam, UIN Syarif Kasim Risu, Vol.7, no. 1, Januari- Juni 2015
- Ahmad, Salimah. "Reformasi Kurikulum dan Tantangan Pendidikan di Brunei." *Jurnal Pendidikan Asia Tenggara*, vol. 10, no. 3, 2023.
- Arifin, H. M. 2022. *Komparasi Sistem Pendidikan di Negara-negara ASEAN: Perspektif Brunei Darussalam*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Aslan, Suhari. 2019. Sejarah Kurikulum Pendidikan Islam Di Brunei Darussalam. *Jurnal Iqra*, (Kajian Ilmu Pendidikan) Volume 4 Issue 1, Juni.
- Awang, Haji (2020) Asbol Bin, and Haji Mail, 'Dasar-Dasar Pendidikan Negara Brunei
- Budiman, H., & Wahyudi, A. (2022). "Analisis Komparatif Kebijakan Pendidikan Multilingual di Brunei dan Indonesia". *Jurnal Pendidikan Komparatif*, 37(2).
Darussalam ', ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan.
- Daulay, H. P. 2023. *Pendidikan Islam di Kawasan Melayu: Analisis Komparatif Brunei, Malaysia, dan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Department of Economic Planning and Development (JPKE). Brunei Darussalam Key Indicators 2022. Bandar Seri Begawan: JPKE, 2022.
- Department of Economic Planning and Statistics (JPES). (2023). *Ministry of Finance and Economy*. Bandar Seri Begawan: Labour Force Survey.
- Hamid, S. A., & Rahman, N. (2022). "Kebijakan Pendidikan Inklusif di Brunei Darussalam: Analisis Kritis terhadap Implementasi dan Dampak Sosial". *Jurnal Studi Pendidikan Internasional*, 38 (4).
- Hidayat, R. (2023). "Transformasi Digital dalam Pendidikan: Studi Implementasi di Brunei Darussalam". *Jurnal Teknologi Pendidikan Indonesia*, 44(3).
- Isnaini Hairunnas,(2023), Septemiarti, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Berunei' *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5.1 4967.
- Lee, S. K., & Abdullah, M. 2021. *Inovasi Pendidikan di Negara-negara ASEAN: Studi Kasus Brunei Darussalam*. Singapura: ISEAS Publishing.

- Manpower Planning and Employment Council (MPEC). (2023) *Salary Guidelines and Career Progression*. Bandar Seri Begawan: Government of Brunei Darussalam.
- Manpower Planning and Employment Council (MPEC). Brunei Darussalam: Human Capital Development Policy. Bandar Seri Begawan: Government of Brunei Darussalam, 2022.
- Ministry of Education. 2017. *Brunei Darussalam Brunei Darussalam Education Statistics*. Bandar Seri Begawan: Ministry of Education.
- Rusdiana, Ahmad. 2015. *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Siregar, N. S. 2021. *Manajemen Pendidikan Tinggi Kontemporer: Perspektif Brunei Darussalam*. Medan: Penerbit Universitas Sumatera Utara.
- Thahir, Ajid. 2002. *Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wong, P. H. 2023. *Pendidikan Tinggi di Brunei: Strategi dan Tantangan Pembangunan Kapasitas Nasional*. Bandar Seri Begawan: Universiti Islam Sultan Sharif Ali.
- Yusof, Noor Azlan. "Challenges in Brunei's Education System." *Journal of Southeast Asian Education Research*, vol. 15, no. 2, 2022.